

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**KECAMATAN MARANGKAYU
TAHUN 2025-2029**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029



KECAMATAN MARANGKAYU
JL. MULAWARMAN NO.15 RT.02 DESA SEBUNTAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dengan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029 sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

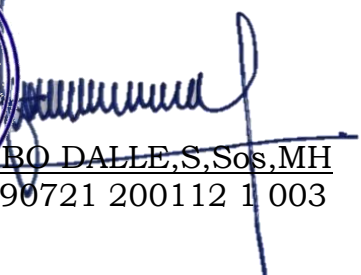
Sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Penyusunan RENSTRA 2025–2029 ini dirancang sebagai pedoman pelaksanaan program diurus pemerintahan bidang perencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen ini mencakup berbagai kebijakan strategis yang disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan terkait, serta memprioritaskan pencapaian target yang terukur, relevan, dan berkelanjutan.

Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan keluarga berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing, serta mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara menuju masa depan yang lebih baik.

Demikian kata pengantar ini dibuat sebagai pengantar dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Marangkayu, 05 Januari 2026


CAMAT

H. RAMBO DALLE, S.Sos, MH
NIP. 19690721 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	27
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan.....	54
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan...	54
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	57
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	58
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	62
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029	83
3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029	89
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025- 2029	93
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	95
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	95
4.2 Sub Kegiatan Prioritas	130
4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	130

BAB V PENUTUP 133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 9

Tabel 2.2 Persentase Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 10

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Marangkayu Menurut Golongan Tahun 2025 28

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Marangkayu Menurut Kepangkatan Tahun 2025 29

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Marangkayu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025..... 30

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Kecamatan Marangkayu Yang Menduduki Jabatan Esselon Tahun 2025 31

Tabel 2.7 Data Aset Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 31

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Marangkayu 35

Tabel 2.9 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marangkayu 43

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Kecamatan 58

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Marangkayu 74

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah..... 86

Tabel 3.2 Strategi Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029 89

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah 92

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 93

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah..... 98

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Marangkayu..... 109

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 130

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marangkayu 131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administratif Kecamatan Marangkayu.....	8
Gambar 2.2	Persentase Luas wilayah Desa di Kecamatan Marangkayu	8
Gambar 2.3	Jumlah RT Per Desa di Kecamatan Marangkayu	9
Gambar 2.4	Peta Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Marangkayu	11
Gambar 2.5	Struktur Organisasi Kecamatan Marangkayu.....	27
Gambar 2.6	17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih....	64
Gambar 3.1	Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	83
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	85
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Marangkayu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai potensi sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan, serta keanekaragaman hayati yang tinggi, Marangkayu memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Posisi geografisnya yang diapit oleh 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Kecamatan Marangkayu menjadi perlintasan perekonomian dan transportasi masyarakat dari 2 Kabupaten tersebut. Ini memberikan peluang dan tantangan baru yang memerlukan perencanaan strategis yang mantap untuk menghadapi dinamika pembangunan pada periode 2025-2029.

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Marangkayu akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renscana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Marangkayu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023- 2042;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
12. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
13. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 23 Desember 2025 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Marangkayu dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Marangkayu;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Marangkayu;
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Marangkayu untuk periode 5 (lima) tahun kedepan;
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran;
5. Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja target, dan pagu indikatif;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Marangkayu.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Marangkayu periode tahun 2025 s/d 2029 adalah sebagai berikut:

1. BAB 1 Pendahuluan

- Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah;
- Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum;

- Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. BAB 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

3. BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada :

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

4. BAB 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
- Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030

merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030;

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi;
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK);
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

5. BAB 5 Penutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Marangkayu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kecamatan Marangkayu terletak antara 115°46'–116°28' Bujur Timur dan 0°02'–0°27' Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 2.160,90 km². Ketinggian Kecamatan Marangkayu sekitar 18 meter dari permukaan laut.

Secara administratif wilayah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kota Bontang;

Sebelah Timur : Selat makasar;

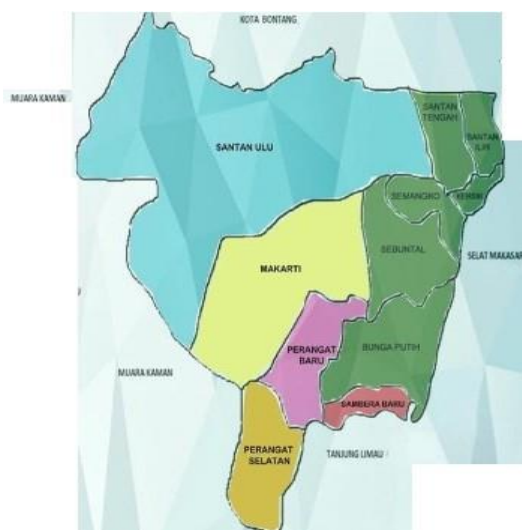
Sebelah Selatan : Kecamatan Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Sebelah Barat : Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman.

Wilayah Kecamatan Marangkayu terdiri dari 11 desa, diantaranya Desa Sebuntal, Desa Se,angko, Desa Kersik,Desa Santan Ilir,Desa Santan tengah,Desa santan Ulu,Desa makarti,Desa Prangat Selatan,Desa Prangat Baru,Desa BSambera Baru,Desa Sambera Baru,Dan Desa Bunga Putih. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Sebuntal. Dari sebelas desa tersebut, Desa Prangat Baru merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan, sedangkan Desa Semangko merupakan desa yang letaknya paling dekat dari ibukota kecamatan, yaitu 4 km. Pada umumnya, desa yang ada di Kecamatan Marangkayu dapat ditempuh melalui jalan darat .

Seluruh desa di Kecamatan Marangkayu terletak pada satu daratan dan terdapat satu sungai yaitu Sungai Santan yang memanjang dari Desa Santan Ilir,Desa saantan tengah dan di bagian hulu sungai hingga ke Desa Santan Ulu.

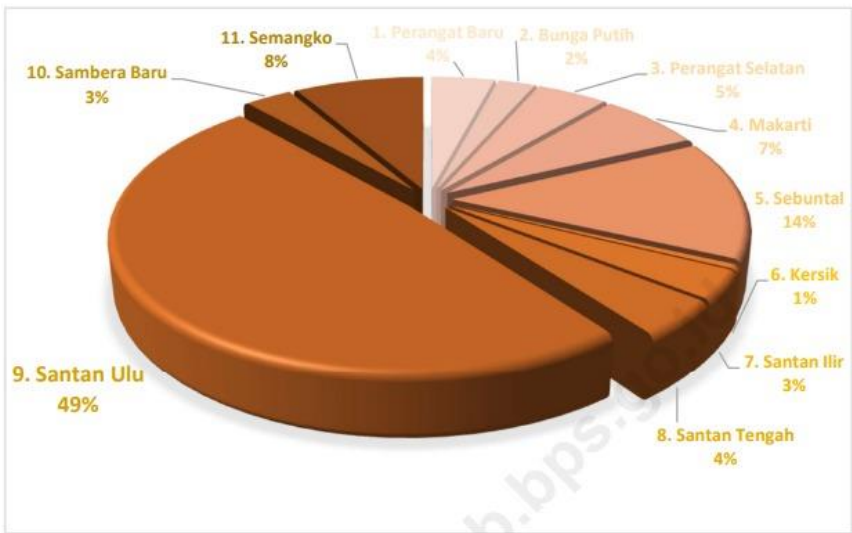
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kecamatan Marangkayu



Sumber : Kecamatan Marangkayu, 2025

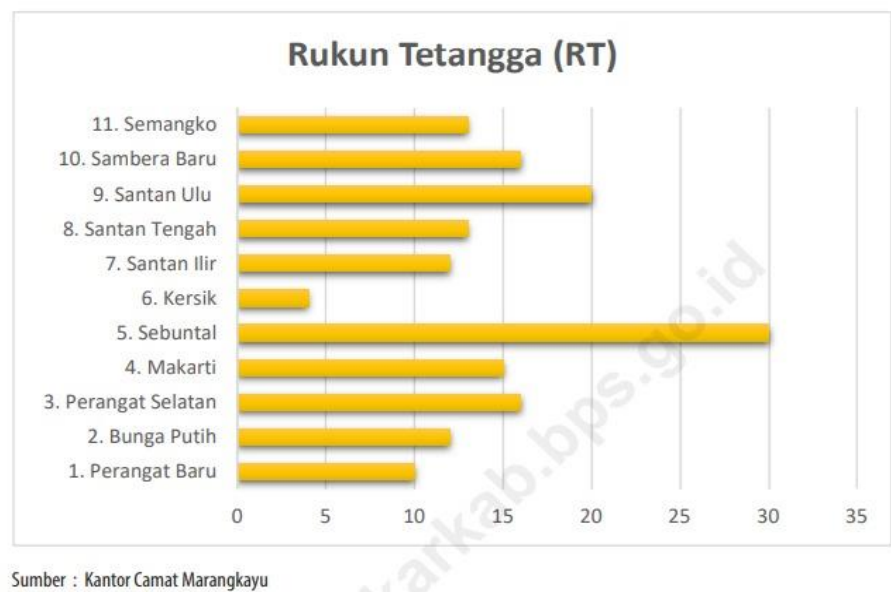
Dengan persentase luas wilayah per desa di kecamatan Marangkayu sebagai berikut :

Gambar 2.2. Persentase Luas wilayah Desa di Kecamatan Marangkayu



Sumber : Kantor Camat Marangkayu

Sedangkan jumlah rukun tetangga per-desa bisa dilihat pada gambar berikut :
Gambar 2.3. Jumlah RT Per Desa di Kecamatan Marangkayu



Jumlah penduduk Kecamatan Marangkayu pada bulan Agustus tahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Desa	Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
Prangat Baru	350	56	406
Bunga Putih	472	96	568
Prangat Selatan	543	138	681
Makarti	669	146	815
Sebuntal	1.656	414	2.070
Kersik	288	67	355
Santan Ilir	589	148	737
Santan tengah	654	134	788
Santan Ulu	1.101	231	1.332
Sambera Baru	459	82	541
Semangko	952	217	1.169
Jumlah Total	7.733	1.729	9.462

Sumber : Kecamatan Marangkayu, Per Agustus 2025

Penduduk Kecamatan Marangkayu pada tahun 2025 tercatat sebanyak 9.462 orang, terdiri dari 7.729 laki-laki dan 1.728 perempuan, yang tersebar di 11 desa. Proporsi ini menunjukkan bahwa 52,58% dari total penduduk adalah laki-laki, sementara 47,42% adalah perempuan. Secara umum, sebaran penduduk di Kecamatan Marangkayu dapat dikatakan cukup merata. Berdasarkan data, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Sebuntal yang merupakan ibu kota kecamatan dengan total 2.070 jiwa. Sebaliknya, Desa Loa Sakoh menjadi desa dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 355 jiwa.

Tabel 2.2 Persentase Distribusi Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Marangkayu, 2025

Desa	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (/Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
[1]	[2]	[3]	[4]
Prangat Baru	3,70	31,32	118,36
Bunga Putih	5,67	81,44	107,63
Prangat Selatan	6,74	50,78	106,07
Makarti	8,13	42,11	97,35
Sebuntal	20,63	51,95	104,46
Kersik	3,80	272,92	110,83
Santan Ilir	7,24	76,60	103,44
Santan tengah	8,40	70,05	105,83
Santan Ulu	16,01	11,47	118,81
Sambera Baru	5,48	62,05	102,08
Semangko	14,19	58,61	104,48
Jumlah	100.00	34,89	107,21

Sumber : Kecamatan Marangkayu, Per Agustus 2025

Gambar 2.4. Peta Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Marangkayu Tahun 2025



Sumber : Kecamatan Marangkayu, 2025

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Pada maka tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dari Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat (Sekcam), beberapa Kepala seksi (Kasi) dan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) yang masing-masing membawahi beberapa orang staf, uraian tugas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

- Memimpin, Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, Mengendalikan dan Mengawasi Kegiatan Kecamatan.
- Membantu Bupati sesuai dengan Bidang Tugasnya.
- Memberikan saran dan Masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam Bidang Tugas Umum Pemerintahan.
- Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas umum Pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- Merumuskan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Merumuskan Kebijakan Operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan pada seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasana Fasilitas Pelayanan Umum.
- Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan.
- Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ atau Kelurahan.

- Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek-aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordiansi, Pembinaan, Pengawasan Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan mencakup Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Merencanakan, Mengelola, mengendalikan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian Program dan Kegiatan ditingkat Kecamatan.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan tahunan penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan dan penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- Mengkoordinasikan dan Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- Membina dan Melaksanakan Kerja Sama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut Bidang Tugas dan Tanggung Jawabnya.
- Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Strategis serta Kebijakan Operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

- Menyusun Rencana Kerja Sekretariat Kecamatan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas.
- Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.

- Mengkonsultasikan kegiatan sekretariat yang bersifat urgen kepada Camat.
- Memberikan saran dan masukan kepada camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Melaksanakan Ketatausahaan, Tata Naskah Dinas, Urusan Kearsipan serta Perpustakaan Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengkoordinasikan, Menghimpun dan Menyusun Rencana Strategik serta Kebijakan operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan.
- Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pengisian Blanko Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) di Lingkungan Kecamatan.
- Mengkordinasikan Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan Pegawai untuk disampaikan secara Berkala ke BKD kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Menghimpun dan Menyampaikan bahan-bahan Laporan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir Tahun.
- Menyiapkan bahan-bahan penyuluhan kepada instansi terkait dan masyarakat dibidang dokumentasi dan Informasi.
- Melakukan Hubungan kerja dan Koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Tugas.
- Menyiapkan Bahan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Kantor, Pembinaan serta Pengembangan Pegawai.
- Menyelenggarakan Proses administrasi Perijinan Bidang Pelayanan Pemungutan pendapatan Daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- Mengkoordinasikan Sub-sub Bagian yang melaksanakan Urusan Umum, Kerumahtanggaan, Keuangan dan Kepegawaian dilingkungan Kecamatan.
- Mengkoordinasikan Inventarisasi dan mempersiapkan Urusan Penghapusan Barang.

- Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas dan Menginventarisasi Permasalahan Sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kesekretariatan.
- Melaksanakan dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Sub bagian Umum, Tata Laksana Dan Kepegawaian

Sub bagian Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan Tugas.
- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum yang bersifat Urgen kepada Sekretaris.
- Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Umum.
- Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi.
- melaksanakan urusan Kerumahtanggaan Kecamatan, meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol.
- Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan laporan untuk penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap akhir tahun.
- Melaksnakan layanan administrasi dalam lingkup Kecamatan.
- Menyiapkan pelaksanaan Pemusnahan arsip yang tidak berlaku.
- Meneliti dan Memeriksa hasil pengetikan dan penggandaan.
- Melaksanakan Penyiapan Bahan Penyusunan rencana Kebutuhan perlengkapan dan Perbekalan.
- Menyusun, Mendistribusikan Rencana Kebutuhan Perlengkapan, Daftar Inventarisasi dan perlengkapan Kantor.
- Memelihara Kebersihan Kantor dan Rumah Jabatan Camat.
- Melaksanakan urusan Pengadaan, Inventarisasi dan Penghapusan Barang.

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum serta mencari alternatif pemecahannya.
- Menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan Kecamatan secara sistematis kepada Kantor Pengelolaan asset Daerah.
- Melaksanakan dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Menyusun rencana kerja dan anggaran sub Bagian Kepegawaian sebagai Pedoman pelaksanaan tugas.
- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada sub Bagian Kepegawaian berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkonsultasikan Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian yang bersifat urgen kepada Sekretaris.
- Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Menyusun Laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan ke BKD kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub Bagian Kepegawaian.
- Menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Kepegawaian.
- Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Menghimpun bahan dan data untuk perumusan kebijakan terkait dengan urusan kepegawaian dan diklat.
- Menghimpun, Mengusulkan kelengkapan administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS dan penngangkatan dalam jabatan dilingkungan Kecamatan sesuai syarat yang ditentukan.
- Menyiapkan daftar hadir pegawai dilingkungan Kecamatan.
- Menghimpun, Memproses data dan mengusulkan pemberian penghargaan, pensiun, pemberian sanksi bagi PNS.
- Menghimpun, menginventarisir dan mengusulkan permohonan cuti pegawai dilingkungan kecamatan.
- Menyusun Daftar Urut kepangkatan dan Fasilitas pembuatan DP3 PNS.

- Menyusun daftar penjagaan dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala serta KP.4 pegawai dilingkungan Kecamatan.
- Menghimpun dan Mefasilitasi pengisian blanko Laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) dilingkungan Kecamatan.
- Menghimpun, Mengusulkan kelengkapan adminsitasi pembuatan Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN dan TAPERUM.
- Melaksanakan dan Melaporkan tugas kedinasan lainnya oleh atasan.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Keuangan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas.
- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang bersifat urgen kepada Sekretaris.
- Memberikan saran dan masukan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Keuangan.
- Menyiapkan, mengolah bahan untuk pengambilan kebijakan dalam penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan Pertanggungjawaban keuangan Kecamatan.
- Menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen panganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan.
- Menyiapkan, mengolah bahan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan Pertanggungjawaban keuangan Kecamatan.
- Memeriksa, meneliti menyiapkan bahan pencairan anggaran oleh Bendaharawan / Pemegang Kas.
- Memeriksa, meneliti pelaksanaan pembukuan keuangan oleh Bendaharawan / Pemegang Kas.
- Memeriksa, meneliti penyiapan dan penyusunan laporan Pertanggungjawaban keuangan oleh Bendaharawan / Pemegang Kas.

- Menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Kecamatan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan anggaran.
- Melaksanakan Verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kecamatan.
- Menyiapkan, Mengolah bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Membuat Laporan Keuangan Kecamatan.
- Melaksanakan dan melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

- Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- Mengkonsultasikan kegiatan seksi pemerintahan yang Bersifat Urgen kepada Camat melalui sekretaris.
- Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa/ kelurahan, Pembinaan bidang pertanahan dan pembinaan kelembagaan Masyarakat.
- Mempersiapkan bahan pembinaan administrasi Kependudukan dan catatan sipil.
- Menyusun rencana dan program kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan.
- Mendata, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan Bidang tugasnya.
- Melaksanakan administrasi pertanahan yang menjadi urusan kecamatan.
- Menyiapkan Bahan dan menyelenggarakan rapat koordinasi Pemerintahan.

- Melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas pemerintahan Desa/ Kelurahan.
- Menyelenggarakan administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil serta melakukan pelaporan
- Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pendaftaran kependudukan dan pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- Mefasilitasi, menganalisis materi Peraturan Desa dan Keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati.
- Menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan monografi Desa / Kelurahan.
- Melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan pembentukan badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa/ kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
- Memfasilitasi penyelesaian pengaduan masalah pertanahan.
- Memfasilitasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LPj) Kepala Desa dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
- Melaksanakan urusan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- Menghimpun, menyusun data Kependudukan dan catatan sipil.
- Melaksanakan pembinaan kependudukan dan catatan sipil terhadap Pemerintahan Desa / kelurahan.
- Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan linmas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkonsultasikan kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris.
- Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib perizinan.
- Mempersiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat penertiban, Polisi Pamong Praja, linmas Kecamatan dan Linmas Desa/Kelurahan.
- Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, potensi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- Menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan koordinasi dengan unit lain terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat.
- Mengatur penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban.
- Penegakan, Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pembauran kesatuan bangsa.
- Melaksanakan identifikasi potensi masalah ketentraman dan ketertiban serta upaya pencegahan.
- Memproses administrasi, rekomendasi dan perizinan bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- Meninventarisir, menyusun dan melaporkan data bidang ketentraman dan ketertiban serta linmas.
- Melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang.
- Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI keturunan dan WNA.
- Mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ideology, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama.
- Melaksanakan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- Melakukan pencegahan dan pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- Melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahaya berbahaya.
- Melakukan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

- Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkonsultasikan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris.
- Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- Menyusun program kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, dan kehutanan serta peningkatan produksi dan distribusi hasil produksi.
- Memfasilitasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
- Mempersiapkan bahan urusan dalam bidang perindustrian dan perdagangan, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang perkoperasian, bidang pertambangan dan energi, pembinaan lingkungan hidup.
- Memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong-royong masyarakat.
- Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data kegiatan usaha industri kecil, sumber daya alam dan sumber daya manusia sektor industri.
- Melaksanakan pengumpulan, koordinasi dan pelaporan data bidang pertanian.
- Melakukan koordinasi, bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan diwilayah kecamatan, pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani, kelembagaan kelompok usaha ekonomi produktif.
- Monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan pokok.
- Mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan dan perlindungan terhadap koperasi, usaha perkebunan dan peternakan.
- Melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.
- Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data profil kecamatan dan desa, data kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan.
- Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pertambangan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data perumahan, bangunan gedung dan drainase lingkungan.
- Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan.

- Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi daur Ulang sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan.
- Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang.
- Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.
- Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.
- Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah.
- Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

- Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkonsultasikan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris.
- Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan serta Bantuan social, Kepemudaan, Peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- Mengimpun, menyusun dan mengolah data, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial.
- Melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita dan kehidupan beragama.
- Memfasilitasi kegiatan organisasi social/kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemberdayaan lembaga adat.

- Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang ketenagakerjaan dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- Melaksanakan koordinasi program Keluarga Berencana (KB).
- Menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- Menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan.
- Menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan bantuan bagi korban bencana serta pendistribusiannya.
- Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan.
- Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.
- Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
- Menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan.
- Melaksanakan pendataan mengenai Angkatan Tenaga Kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja.
- Melaksanakan Koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk.
- Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
- melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit, imunisasi balita dan anak sekolah.
- Melaksanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi, kegiatan posyandu.
- Menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan kehidupan beragama.
- Melaksanakan dan melaporkan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pemerintahan yang meliputi :

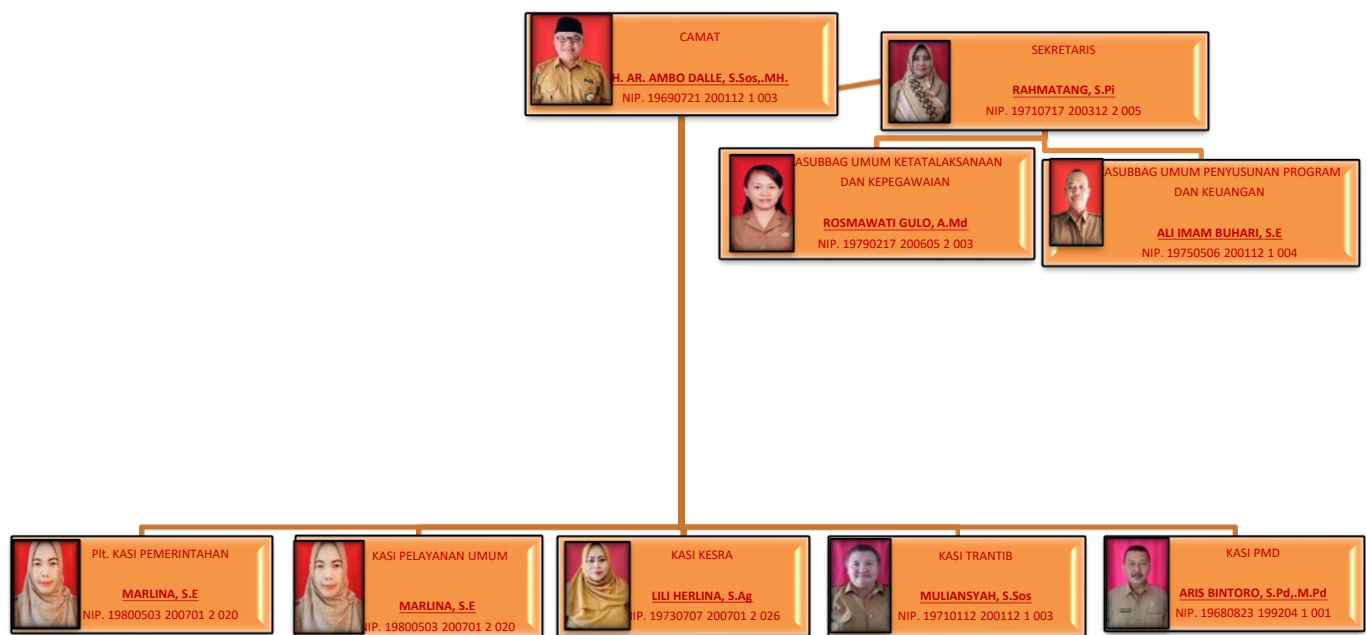
- Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengkonsultasikan kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang bersifat urgen kepada Camat melalui Sekretaris.
- Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- Menyusun rencana dan program Seksi Pelayanan umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan, inventarisasi desa/kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum.
- Menyusun rencana kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan perizinan.
- Menginventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah dilingkup Kecamatan.
- Menyelenggarakan proses administrasi Perizinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
- Menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan.
- Menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai bahan perencanaan dan pengembangan wilayah Kecamatan.
- Meneliti dan melakukan Verifikasi persyaratan berkas permohonan perizinan serta menetapkan besaran retribusi.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Menginventarisasi kantor, rumah dinas, balai desa dan bangunan milik pemerintah lainnya.
- Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data tanah kas desa dan kakayaan desa.

- Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah.
- Menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan, dan keindahan lingkungan.
- Menghimpun, mengolah data dan membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.
- Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan.
- Melakukan pemantauan pada pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman.
- Melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan dan drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air.
- Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase.
- Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum.
- Melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa.
- Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Kecamatan Marangkayu mengacu pada peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Seksi Pelayanan umum.
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.

Gambar 2.5. Struktur Organisasi Kecamatan Marangkayu



Sumber : Kecamatan Marangkayu, 2025

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara mutlak diperlukan ketersediaan sumber daya Pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur yang dimiliki Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Marangkayu Menurut Golongan

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Aparatur Sipil Negara lingkup Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 38 orang. Adapun jumlah dan komposisi ASN seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Marangkayu Menurut Golongan Tahun 2025

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.				
PNS				
1	Pembina Tk I	IV/b	1	
2	Pembina	IV/a	4	
3	Penata Tk I	III/d	1	
4	Penata	III/c	4	
5	Penata Muda Tk I	III/b	2	
6	Penata Muda	III/a	2	
7	Pengatur Tk I	II/d	7	
8	Pengatur	II/c	-	
9	Pengatur Muda TK I	II/b	-	
10	Pengatur Muda	II/a	-	
11	Juru Tk I	I/d	-	
12	Juru	I/c	-	
13	Juru Muda Tk I	I/b	-	
	Jumlah		21	
2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja)				
1	PPPK		14	
	Jumlah		27	
3. THL (Tenaga Harian Lepas)				
1	THL		3	
	Jumlah		3	
	Jumlah Keseluruhan Pegawai		51	

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Marangkayu, 2025

Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 28 pria dan 10 wanita dengan dominasi pegawai di Golongan II sebanyak 24 orang.

- b. Sumber Daya Manusia Kecamatan Marangkayu Menurut Kepangkatan
- Berikut adalah jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan pada Kecamatan Marangkayu tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Marangkayu Menurut Kepangkatan Tahun 2025

No	Pangkat	Gol. Ruang	Pegawai		Jumlah
			Pria	Wanita	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	Juru Muda	I/a	-	-	-
	Juru Muda Tk.I	I/b	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-
	Juru Tk.I	I/d	-	-	-
II	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-
	Pengatur	II/c	-	-	-
	Pengatur Tk.I	II/d	3	4	7
III	Penata Muda	III/a	-	2	1
	Penata Muda Tk.I	III/b	1	-	1
	Penata	III/c	-	2	2
	Penata Tk.I	III/d	1		1
IV	Pembina	IV/a	1	2	3
	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	1
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
Total			9	12	21

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Marangkayu, 2025

Menurut kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi pangkat Pengatur Muda dan Pengatur TK I sejumlah 7 orang.

c. Sumber Daya Manusia Kecamatan Marangkayu Menurut Tingkat Pendidikan

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan SLTA.

Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Marangkayu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Pegawai		Jumlah
		ASN	Non ASN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	S.3	-	-	-
2	S.2	3	-	3
3	S.1	10	6	16
4	D.IV	-	-	-
5	SM	-	-	-
6	D.III	-	1	1
7	D.II	-	-	-
8	D.I	-	-	-
9	SLTA	15	16	31
10	SLTP	-	-	-
11	SD	-	-	-
Total		21	30	51

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Marangkayu, 2025

Menurut tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah 31 orang.

- d. Sumber Daya Manusia Kecamatan Marangkayu yang Menduduki Jabatan Eselon Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 tercatat jumlah Pegawai lingkup Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Jabatan Eselon didominasi oleh Eselon IV. Total Pegawai yang menduduki jabatan eselon IV hanya diisi oleh 4 orang.

Adapun jumlah dan komposisi menurut Kepangkatan seperti terlihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Kecamatan Marangkayu Yang Menduduki Jabatan Esselon Tahun 2025

No	Eselon	Pegawai		Jumlah
		Pria	Wanita	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
I	I	-	-	-
2	II	-	-	-
3	III	1	1	2
4	IV	3	3	6
5	V	-	-	-
Jumlah ESSELON		4	4	8
JF		-	-	-
Non ESSELON		-	-	-
Total		4	4	8

Sumber: Bagian Kepegawaian Kecamatan Marangkayu, 2025

- e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain:

- Menunjang perkantoran; kegiatan ketatausahaan/ administrasi
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Kecamatan Marangkayu terbilang sangat minim. Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara:

Tabel 2.7 Data Aset Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

KODE		NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3		ASET TETAP	48.561.055.456,39
	1	TANAH	7.736.716.312,00
	1.01	TANAH	7.736.716.312,00
	2	PERALATAN DAN MESIN	6.461.671.656,92
	2.01	ALAT BESAR	693.204.000,00
	2.02	ALAT ANGKUTAN	2.050.214.380,00
	2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	270.599.000,00
	2.04	ALAT PERTANIAN	59.400.000,00
	2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.741.254.951,92
	2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	102.962.850,00
	2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.214.000,00
	2.08	ALAT LABORATORIUM	436.498.400,00
	2.09	ALAT PERSENJATAAN	29.920.000,00
	2.10	KOMPUTER	1.027.217.075,00
	2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
	2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
	2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
	2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
	2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	45.187.000,00
	2.16	ALAT PERAGA	0,00
	2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
	2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
	2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00

	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	15.071.664.997,47
	3.01	BANGUNAN GEDUNG	14.600.439.205,47
	3.02	MONUMEN	0,00
	3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
	3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	471.225.792,00
	4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	19.291.002.490,00
	4.01	JALAN DAN JEMBATAN	14.065.811.111,00
	4.02	BANGUNAN AIR	3.742.912.729,00
	4.03	INSTALASI	1.108.053.250,00
	4.04	JARINGAN	374.225.400,00
	5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
	5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
	5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
	5.03	HEWAN	0,00
	5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
	5.05	TANAMAN	0,00
	5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
	5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
	6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
	6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5		ASET LAINNYA	531.916.399,00
	2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
	2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
	3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
	3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	
			0,00
	4	ASET LAIN-LAIN	531.916.399,00
	4.01	ASET LAIN-LAIN	531.916.399,00

Sumber: Bagian Umum Kecamatan Marangkayu, 2025

Aset yang dimiliki Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi terdiri dari 32 jenis aset tetap dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Sarana transportasi seperti kendaraan operasional roda 4 dalam kondisi baik sedangkan untuk roda 2 dengan kondisi rusak berat. Selain itu, terdapat peralatan kantor berupa PC unit, laptop, printer, proyektor, dan kursi rapat untuk mendukung kegiatan administrasi serta pelayanan. Semua aset dalam kondisi baik. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Kecamatan terjauh kedua di Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi masyarakat Kecamatan Marangkayu masih belum sepenuhnya sejahtera. Berbagai kendala yang biasa ditemukan pada daerah pedalaman juga ditemukan di kecamatan Marangkayu, seperti rusaknya akses jalan menuju Kecamatan Marangkayu, kurangnya sarana dan prasarana umum, sumber daya manusia yang lemah serta keterlambatan informasi dikarenakan tidak stabilnya jaringan internet membuat Kecamatan Marangkayu belum maksimal dalam hal pelayanan publik.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Marangkayu untuk menutupi semua keterbatasan tersebut dalam mensejahterakan masyarakat. Fokusnya adalah pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kantor Camat Marangkayu dengan memanfaatkan fasilitas yang minim tersebut. Sementara pembangunan masyarakat secara menyeluruh dilakukan dengan memberdayakan desa, baik aparatur desa, LSM maupun masyarakat secara umum. Caranya adalah dengan melakukan pendampingan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Hasilnya adalah setiap desa di Kecamatan Marangkayu mampu melaksanakan pembangun sebagaimana yang diharapkan. Dengan cara ini diharapkan bisa terwujud masyarakat Kecamatan Marangkayu yang sejahtera secara menyeluruh.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan pada Kecamatan Marangkayu yang menggambarkan tugas fungsi Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD. Capaian Kinerja Kantor Camat Marangkayu berdasarkan tujuan, sasaran dan target rencana strategis Kantor Camat Marangkayu pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Marangkayu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
I Indikator Tujuan Dan Sasaran:																	
Indikator Tujuan:																	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	70	70	70	80	85	86,41	89,01	90,42	n/a	n/a	123,44	127,16	129,17	-	-
Indikator Sasaran:																	
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	65	70	80	90	100	100	100	100	n/a	n/a	153,85	142,86	125	-	-
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	5	7	10	13	15	557,65	112,43	25,4	n/a	n/a	11153	1606,14	254	-	-
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	1	2	3	4	5	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	-	-
II Indikator Program :																	
III Indikator Kegiatan :																	
II	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah desa/kelurahan yang terhubung ke ibu kota kecamatan melalui jalur darat dibagi total desa/kelurahan yang terdapat di kecamatan dikali 100	Persen	86,36	86,36	86,36	86,36	90,91	86,36	86,36	86,36	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan	Kegiatan	23	23	23	23	23	23	23	23	n/a	n/a	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif																
	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	11	11	11	11	11	11	11	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	Dokumen	26	50	26	26	26	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0	-	-
	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Dokumen	3	1	1	1	1	3	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
II	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
III	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	30	30	30	30	30	30	50	50	n/a	n/a	100	167	167	-	-
	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	11	11	11	11	11	11	11	11	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	n/a	n/a	100	100	100	-	-
II	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	-	100	100	-	-
III	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	2	8	8	8	2	5	5	n/a	n/a	-	250	63	-	-
	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	0	1	4	4	4	1	5	5	n/a	n/a	-	500	125	-	-
	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	Kegiatan	0	1	4	4	4	1	4	4	n/a	n/a	-	400	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
II	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	-	100	100	-	-
III	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	0	5	5	5	5	5	5	5	n/a	n/a	-	100	100	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	0	35	35	35	35	35	35	40	n/a	n/a	-	100	114	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	0	75	75	75	75	70	70	70	n/a	n/a	-	93	93	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kali	0	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	-	100	100	-	-
II	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	35	45	55	65	75	100	100	100	n/a	n/a	286	222	182	-	-
III	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	n/a	n/a	100	100	100	-	-
II	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	74	74	78	78	0	91,3	76,83	74,61	n/a	0	123	104	95,65	-
III	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	44	58	58	58	58	44	58	58	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	10	10	10	10	10	10	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	7	7	7	7	7	7	7	n/a	n/a	-	100	100	-	-
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	n/a	n/a	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	7	7	7	7	7	7	7	n/a	n/a	-	100	100	-	-
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	20	20	20	20	20	20	20	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		37	37	37	37	37	37	37	37	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	35	35	35	35	35	30	30	30	n/a	n/a	86	86	86	-	-
	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Laporan	24	24	24	24	24	24	24	24	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	5	5	5	5	5	5	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	5	55	55	55	55	5	55	55	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	5	5	5	5	4	4	4	n/a	n/a	-	80	80	-	-
	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Unit	0	5	5	5	5	0	0	0	n/a	n/a	-	0	0	-	-
	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	5	5	5	5	5	4	4	4	n/a	n/a	80	80	80	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	0	40	40	40	40	30	30	30	n/a	n/a	-	75	75	-	-
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	0	40	40	40	40	0	40	0	n/a	n/a	-	100	0	-	-
III	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	7	9	9	9	9	7	9	9	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	1	1	1	1	0	1	1	n/a	n/a	-	100	100	-	-
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Buku	0	5	5	5	5	0	0	0	n/a	n/a	-	0	0	-	-
	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	8	3	3	3	3	2	3	0	n/a	n/a	25	100	0	-	-
	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	0	n/a	n/a	100	100	0	-	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	7	1	1	1	1	1	1	0	n/a	n/a	14	100	0	-	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	1	1	1	1	0	1	0	n/a	n/a	-	100	0	-	-
III	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	Rata-Rata Pertumbuhan
--------	-------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
III	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	78	78	78	78	78	78	78	78	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	30	30	30	30	30	30	0	0	n/a	n/a	100	0	0	-	-
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	25	25	25	25	25	25	25	25	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	5	5	5	5	1	5	5	n/a	n/a	20	100	100	-	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	5	5	5	5	1	1	1	n/a	n/a	20	20	20	-	-

Sumber: Kecamatan Marangkayu, 2025

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Marangkayu

	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,389,105,476	8,449,291,836.	10,806,306,938	8,008,951,984	7,028,153,437	7,580,627,325	6,874,330,491	8,936,637,133	5,563,288,307	n/a	72.97	81.36	82.70	69.46	n/a	8,936,361,934	81.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	200,000,000	15,455,147,326	38,261,863,564	13,174,353,000	23,016,156,300	193,852,500	15,352,247,254	36,803,739,678	12,405,737,894	n/a	96.93	99.33	96.19	94.17	n/a	18,021,504,038	89.83
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	308,525,000	433,248,436.	4,801,710,420	486,107,980	550,270,600	13,742,000	320,929,800	4,076,996,750	346,829,800	n/a	4.45	74.08	84.91	71.35	n/a	1,315,972,487	90.40
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,000,000	18,654,837.00	65,000,000	366,125,775	2,500,000	85,777,000	3,540,000	-	0	n/a	85.78	18.98	0.00	0.00	n/a	110,456,122	20.22

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	180,000,000	467,086,000	366,125,775	177,878,000	-	0	232,065,000	242,825,450	n/a		0	49.68	66.32	n/a	297,772,444	53.16
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	108,447,450	-	-	-	-	n/a					n/a	108,447,450	-
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1,723,687,893	-	-	-	-	1,661,791,000	-	-	-		96.41					1,723,687,893	96.41
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	870,089,156	-	-	-	-	853,105,200	-	-	-		98.05					870,089,156	98.05
Program Penyelenggaraan Jalan	9,833,439,589	-	-	-	-	9,516,851,378	-	-	-		96.78					9,833,439,589	96.78

Sumber: Kecamatan Marangkayu, 2025

Pada tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan dengan target pada Renstra periode 2022 – 2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

- Adanya sumber dana yang cukup dari APBD;
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturnya Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian;
- Merupakan hasil kerjasama tim seluruh aparaturnya dilingkup Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Adapun sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Marangkayu adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel 2.9 di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada empat program utama Kecamatan Marangkayu dari tahun 2022 hingga 2024. Secara

umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup baik, seluruh program dengan capaian rasio rata-rata diatas 80%.

Secara keseluruhan, Kecamatan Marangkayu menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi cukup tinggi, meskipun terdapat penurunan alokasi pada beberapa program karena adanya penyesuaian anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari tabel 2.9 di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2022 sampai dengan 2026 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Marangkayu sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target;
- Kerjasama tim pengelola anggaran yang memadai baik Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK maupun Pejabat
- Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Marangkayu.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran di beberapa sub kegiatan dan tidak bisa 100% seperti seperti penyediaan jasa komunikasi dan Listrik, Belanja Gaji dan Tunjangan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan kecamatan Marangkayu adalah seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah kecamatan. Secara lebih rinci, kelompok sasaran ini meliputi:

- Penduduk kecamatan : Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
- Perangkat daerah : Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan.
- Organisasi kemasyarakatan : Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain.
- Dunia usaha : Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
- Kelompok rentan : Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
- Pihak lain yang membutuhkan pelayanan : Institusi pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan, Kecamatan Marangkayu dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan Marangkayu maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Marangkayu antara lain:

- a. Polsek Kecamatan Marangkayu, untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara dimasyarakat.
- b. Koramil Marangkayu, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Kantor Urusan Agama, untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu jika pernikahan mendadak ingin dilakukan dari batas waktu pengurusan administrasi yang sudah ditentukan.

- d. Satpol PP, untuk membantu dalam keamanan lingkungan melalui satuan regu linmas yang ada di Kecamatan dan Desa
- e. Badan Kesbangpol, untuk membantu kecamatan dalam memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan melalui forum kerukunan umat beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- f. Dinas Pemadam Kebakaran, untuk membantu dalam penanganan bencana kebakaran yang terjadi di kecamatan
- g. BPBD, untuk membantu dalam penanganan bencana alam yang terjadi di kecamatan.
- h. Dinas Pertanian dan Perkebunan, mitra kecamatan dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petani dan pekebun, memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas benih dan saprodi demi meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan stabilitas pasokan pangan ditingkat lokal. Mereka juga berperan dalam penanggulangan hama penyakit tanaman dan fasilitasi akses petani terhadap program-program pemerintah.
- i. DP3A, mitra kecamatan dan membantu dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberdayakan perempuan melalui sosialisasi, advokasi, pendampingan korban, dan pembentukan kelompok masyarakat seperti Pemberdayaan Anak dan Remaja.
- j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), di kecamatan membantu sebagai pelaksana teknis di lapangan untuk urusan perumahan, permukiman, dan infrastruktur terkait.
- k. DLHK, untuk membantu dalam penanganan masalah persampahan yang ada di kecamatan dengan menyediakan kendaraan operasional khusus sampah, dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di kecamatan.

1. Puskesmas, untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- m. Bappeda, untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Marangkayu berjalan dengan baik dan terarah.
- n. DPMD, untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa/Kelurahan dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa dan Kelurahan.
- o. Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- p. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan, meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK di Tingkat RT. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Marangkayu.
- q. Inspektorat, untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta Evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dari Kecamatan.

- r. Bapenda, mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah.
- s. Dinas Sosial, mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
- t. Dinas Koperasi, mitra kerja dengan terkait UMKM dalam bentuk pembinaan, seperti pelatihan, bantuan permodalan, pendampingan izin usaha, serta fasilitas pengembangan dan perlindungan usaha.
- u. Dinas Perhubungan, mitra kerja yaitu terkait dengan LPJU dan Tranportasi pada wilayah Kecamatan.
- v. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mitra kecamatan dalam mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan program pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, termasuk menyebarluaskan informasi publik, mendukung transformasi digital, serta meningkatkan literasi informasi dan teknologi masyarakat melalui program yang dijalankan bersama aparaturnya kecamatan dan desa, Diskominfo juga membantu dalam pemenuhan peralatan dan perlengkapan terkait jaringan internet kecamatan, dan kecamatan sebagai pusat data.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Masyarakat Kecamatan Marangkayu sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Marangkayu adalah “Meningkatnya layanan administrasi Kecamatan”. Pelayanan dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Marangkayu yang didukung oleh sarana

dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Marangkayu maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah yang terdapat dalam tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10. Pemetaan Permasalahan Kecamatan.

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]
Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
		Masih minimnya infrastruktur yang mendukung pelayanan publik khususnya berbasis digital

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]
		Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan
		Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.
		Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata
		Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak
	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
		Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.
		Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
		Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa
	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar,	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]
	konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau desa tertentu Belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju kecamatan, hanya tersedia moda transportasi antar kota. Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]
		Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa
		Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa
		Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.
		Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
[1]	[2]	[3]
		Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
		Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Marangkayu, 2025

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

Sebelum perumusan isu strategis kecamatan, berikut ini dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program prioritas

kepala daerah, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa aspek lainnya.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan dimulai dengan merumuskan Visi, Misi, dan nilai nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi kedepan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif.

Adapun Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

” Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sedangkan Misi yang diemban untuk mencapai Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;

4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih diatas selanjutnya dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah :

Gambar 2.6.
17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

17 PROGRAM DEDIKASI

Misi#1.

Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;

Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia;

Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa

Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik

Program Etam Sejahtera

Misi#3.

Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Program Pelayanan Publik Cerdas

Program ASN Kukar Terbaik

Misi#2.

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif

Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera

Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh

Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.

Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.

Program Stimulus Komunitas Kreatif

Misi#4.

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Program RT Ku-Terbaik

Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.

Program Jaga Lingkungan Lestari

Misi#5.

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.

Program Internet Desa Gratis.

Program Permukiman Idaman Terbaik.

Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka kecamatan mendukung secara langsung ke program dedikasi: a). Program Pelayanan Publik Cerdas dan b). Program RT-ku Terbaik. Selain itu, kecamatan juga mendukung secara tidak langsung terhadap program-program dedikasi lainnya. Adapun penjelasan kedua program dedikasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Publik Cerdas

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip smart and good governance hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

b. Program RT Ku-Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan

ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup di wilayah Kecamatan adalah Proses evaluasi dan analisis terhadap rencana tata ruang wilayah kecamatan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan. Ini mencakup penilaian kesesuaian rencana dengan kondisi lingkungan, potensi dampak, serta upaya mitigasi dan pelestarian lingkungan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu :

- Kegiatan Pasca Tambang Belum Dilakukan dengan Baik

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama tambang batubara, meninggalkan banyak lahan dengan karakteristik pasca tambang yang merusak. Lubang besar, penurunan muka tanah, dan potensi longsor menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan lingkungan hidup. Proses reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban belum terlaksana optimal, menyebabkan gangguan ekologis jangka

panjang serta memperparah kerusakan lahan dan menurunkan nilai produktivitas wilayah.

- **Kerusakan Hutan Dan Lahan**

Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tingkat kerusakan hutan dan perubahan lahan yang cukup tinggi. Penebangan liar, perambahan lahan, dan kegiatan pertambangan ilegal menjadi penyebab utama degradasi kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 83% dari total wilayah kabupaten. Dari kawasan ini, sekitar 52% merupakan hutan produksi yang semestinya dijaga keberlanjutannya. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan ekosistem hutan rentan rusak dan kehilangan fungsi ekologis

- **Perubahan Lingkungan Sekitar Perairan Sungai dan Danau**

Perubahan lingkungan juga terlihat nyata di wilayah perairan, pesisir, dan danau. Ekosistem mangrove di Delta Mahakam rusak parah, menyebabkan abrasi meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Intrusi air laut di DAS Mahakam memperburuk kualitas air minum masyarakat. Di wilayah 3 danau (Jempang, Semayang, dan Melintang), menurunnya vegetasi air, kualitas air yang tercemar, serta pendangkalan sungai telah mengganggu sistem hidrologi dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan permukiman dan konversi lahan yang tidak terkendali.

- **Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang perlu segera diantisipasi. Banyak lahan pertanian produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralih menjadi kawasan tambang, industri, maupun permukiman tanpa perencanaan yang komprehensif. Hal ini mengancam ketahanan pangan daerah dan menurunkan daya dukung lingkungan. Ketiadaan regulasi

spesifik di tingkat kabupaten mengenai pembatasan alih fungsi lahan memperburuk kondisi, dan menyebabkan konflik ruang serta ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

3. Potensi Kecamatan Marangkayu

Kecamatan Marangkayu memiliki potensi yang sangat beragam dan strategis, diantaranya:

a. Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam:

- Pertanian dan Perkebunan: Potensi pertanian dan perkebunan utama di Kecamatan Marangkayu adalah kelapa sawit, yang menjadi komoditas ekonomi utama dengan produksi tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain kelapa sawit, sektor perkebunan lain seperti karet juga memiliki potensi. Namun, Marangkayu secara spesifik dikenal sebagai sentra perkebunan sawit yang sangat kuat.
- Perikanan Air tawar: Potensi perikanan di Kecamatan Marangkayu, terletak pada pemanfaatan perairan umum yang mengalir disepanjang Sungai Belayan, serta potensi pengembangan budidaya ikan di area sungai dan rawa. Meskipun sebagian besar masyarakat bergantung pada kelapa sawit, perikanan tangkap memberikan potensi ekonomi lain bagi masyarakat sekitar, yang dapat ditingkatkan melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik.
- Peternakan: Kecamatan Marangkayu berpotensi mengembangkan usaha peternakan seperti sapi, kerbau, ayam, kambing, atau babi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan sebagai sumber pendapatan.
- Kehutanan: Potensi kehutanan di Marangkayu meliputi keberadaan hutan desa sebagai upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat, seperti di Desa Genting Tanah. Selain itu, wilayah tersebut juga

memiliki potensi hutan kelompok (KBK) yang berfungsi untuk menjaga tata batas kawasan hutan dan mencegah perambahan.

- Pertambangan dan Industri: Di Kecamatan Marangkayu, terdapat beberapa kegiatan pertambangan batu bara, di antaranya oleh PT. Indo Bara Pratama, PT Fajar Sakti Prima (Bayan Group), dan lainnya. Potensi utama Kecamatan Marangkayu adalah industri kelapa sawit, yang didukung oleh luasnya perkebunan dan 80% penduduknya yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Berbagai upaya hilirisasi dilakukan, termasuk rencana pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah (PMM) untuk meningkatkan nilai tambah produk sawit dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak disebut secara eksplisit, potensi sumber daya alam lainnya di Marangkayu juga dapat mendukung pengembangan industri hilir dan meningkatkan nilai ekonominya.
- Sektor Pariwisata: Potensi wisata utama di Kecamatan Marangkayu adalah Pulau Layung Seribu (atau Pulau Sahrai), yang menawarkan pesona alam alami yang indah, sejuk, dan asri, dengan rencana pengembangan untuk wahana wisata, tempat memancing, dan pusat kuliner. Potensi lain meliputi pengembangan pariwisata berbasis komunitas, produk ekonomi kreatif seperti souvenir dan kuliner khas, serta perbaikan infrastruktur dan akses jalan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.

b. Memiliki Posisi Strategis

Terletak di wilayah utara Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur. Dengan semakin berkembangnya wilayah Kecamatan

Marangkayu dan pembangunan yang cukup pesat, di mana Kecamatan Marangkayu menjadi tempat lalu lintas perekonomian masyarakat dari Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Timur dan dari Kabupaten Kutai Barat, tentunya memerlukan perencanaan pembangunan wilayah yang tepat sasaran.

Kecamatan Marangkayu juga sebagai bagian dari daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) baru Indonesia, membuka peluang signifikan untuk pengembangan di sektor perkebunan, perekonomian, infrastruktur, dan layanan publik di masa depan.

4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Kecamatan

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan yaitu: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

5. Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah

- a. Aspek Global: Intinya adalah dampak perubahan iklim (seperti banjir, kekeringan) dan tekanan dari permintaan pasar dunia untuk sumber daya alam (misal: sawit, batubara) yang memengaruhi lingkungan Kecamatan Marangkayu.
- b. Aspek Nasional: Intinya adalah dampak besar dari pembangunan IKN karena Kecamatan Marangkayu sebagai

salah satu daerah penyangga IKN dengan pengembangan sektor pertanian, Perkebunan dan pariwisata.

- c. Aspek Regional: Intinya adalah masalah lingkungan lokal dan antar wilayah seperti pencemaran sungai, masalah sampah, dan kejadian banjir tahunan yang terjadi di Kecamatan Marangkayu.
- d. Pengelolaan Sampah: Volume sampah yang tinggi di Kecamatan Marangkayu dengan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai, kurangnya regulasi pengelolaan sampah, kurangnya petugas dan armada pengangkut sampah, serta adanya tempat pembuangan sampah ilegal.
- e. Kualitas Air Sungai: Penurunan kualitas mutu air Sungai Belayan dan beberapa anak sungai di Kecamatan Marangkayu yang dikategorikan "tercemar sedang" hingga "tercemar parah" di beberapa titik, bisa mengancam ketersediaan air bersih dan populasi ikan yang ada.
- f. Banjir: Permasalahan banjir yang masih sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah bantaran Sungai Belayan yang mengalir di sepanjang Kecamatan Marangkayu.

6. Isu Strategis Perangkat Daerah (Kecamatan Marangkayu)

- a. Dampak dan Peluang IKN: Meskipun masuk dalam salah satu daerah penyangga IKN, pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan potensi pertanian dan pariwisata dari pemerintah pusat dan daerah belum signifikan, sementara pengembangan SDM sudah mulai dilakukan di beberapa sektor.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (excellent service) yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.

- c. Peningkatan Infrastruktur: Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
- d. Kemiskinan dan Stunting: Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif baik itu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui instansi terkait berkerjasama dengan pihak kecamatan dan stakeholder lainnya (pihak swasta dan Masyarakat).
- e. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batubara), dan memastikan kelestarian ekosistem.
- f. Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur kecamatan yang profesional dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis—termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Marangkayu memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius.

Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Marangkayu. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi yang jelas,

serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai pembangunan Kecamatan Marangkayu yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.11. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Marangkayu

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	Dampak dan Peluang IKN
Memiliki posisi yang strategis (daerah penyangga IKN)	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan Infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkunagn hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar		Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	Peningkatan Layanan Infrastruktur

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			Kemiskinan dan Stunting
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Marangkayu, 2025

Penjelasan masing-masing isu strategis Kecamatan Marangkayu dalam kurun waktu 2025 –2029, adalah sebagai berikut:

1. Dampak dan Peluang IKN.

Kecamatan Marangkayu sebagai salah satu daerah penyangga di Kabupaten Kutai Kartanegara membuka peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari wilayah yang masuk dalam peta zonasi bagian utara, dimana zona utara difokuskan pada pengelolaan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kecamatan Marangkayu diproyeksikan akan mengalami perkembangan pesat, baik dari segi infrastruktur maupun migrasi penduduk. Namun, peluang ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait tekanan terhadap lahan produktif, potensi konflik tata ruang, dan dampak sosial-ekonomi dari proses urbanisasi yang cepat.

Pemerintah Kecamatan Marangkayu harus segera menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kebijakan pembagian zona oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk pihak pemerintah pusat, akan menjadi kunci untuk memastikan pengembangan potensi yang ada dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari migrasi penduduk yang dipicu oleh pengembangan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata, seperti peningkatan kebutuhan akan perumahan, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan.

2. Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Marangkayu masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan

transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan, pengelolaan data penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Meskipun Kecamatan Marangkayu memiliki potensi besar dalam beberapa sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor kecamatan, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Marangkayu dapat menjadi kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

4. Kemiskinan dan Stunting

Kemiskinan dan stunting masih menjadi tantangan terberat baik itu pemerintah pusat dan daerah. Kemiskinan berkontribusi signifikan terhadap tingginya kasus stunting karena membatasi akses keluarga terhadap gizi yang memadai, layanan kesehatan, dan sanitasi yang bersih. Kemiskinan menciptakan masalah serius di mana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan dasar pada ibu hamil dan anak-anak, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan stunting.

Dengan adanya pengembangan potensi kewilayahan, diharapkan Kecamatan Marangkayu bisa memanfaatkan peluang besar ini. Mengurangi kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan melalui UMKM-UMKM yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit masalah kemiskinan bisa berkurang, seiring dengan berkurangnya kemiskinan maka masalah stunting pun bisa teratasi.

Selain mengembangkan perekonomian masyarakat, pihak kecamatan pun perlu bekerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah stunting, karena mengatasi kemiskinan dan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, kegiatan yang bisa dilakukan seperti diversifikasi pangan yaitu mendorong pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan seperti beras, peningkatan akses layanan dasar dan meningkatkan peran perempuan serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran gizi, sanitasi dan kebersihan.

5. Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Kecamatan Marangkayu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, perkebunan, dan perikanan. Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Marangkayu, seperti perkebunan, perikanan, dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke

modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah kecamatan perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil perkebunan dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat Marangkayu dapat lebih mudah memasarkan hasil perkebunan dan perikanannya.

Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan hutan dan sungai. Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah kecamatan akan melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya pada lahan bekas pembalakan liar dan hutan yang terbakar karena dijadikan masyarakat setempat untuk berkebun. Hal ini diupayakan dengan berkoodinasi dengan perangkat daerah teknis dan pihak lain termasuk peran masyarakat dan swasta. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga akan ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menghadapi tantangan pengembangan kewilayahan tentunya tata kelola pemerintahan menekankan bagaimana semua proses, lembaga, dan praktik digunakan untuk mengatur isu publik secara transparan,

akuntabel, dan efisien, demi melayani masyarakat dengan baik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam pembangunan .

Pemerintah Kecamatan Marangkayu perlu berbenah dalam hal pelayanan publik, mulai dari penyediaan sumber daya manusia yang smart dan profesional, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sarana prasarana pendukung demi lancarnya pelayanan yang diberikan.

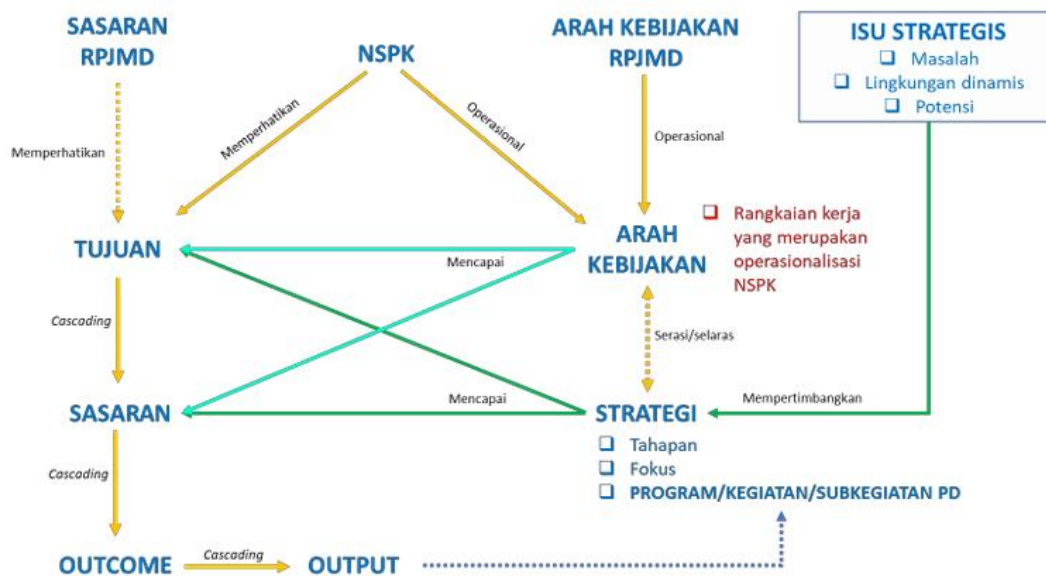
Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti kompleksitas di mana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan banyak aspek dan memerlukan intervensi yang kompleks, selanjutnya perlu adanya komitmen dan sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama serta Setiap daerah memiliki permasalahan pemerintahan yang berbeda, sehingga implementasi tata kelola harus disesuaikan dengan konteks lokal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Marangkayu dilakukan dengan konsep seperti gambar berikut:

Gambar 3.1. Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Hubungan antara tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan dan sasaran dicapai dengan beberapa strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029

a. Tujuan Renstra Kecamatan Marangkayu

Tujuan Renstra Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk

menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan saasaran RPJMD. Kecamatan Marangkayu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"Meningkatnya kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan"**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Marangkayu, yaitu memberikan pelayanan yang prima di wilayah kecamatan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu **"Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara."** Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan Renstra Kecamatan Marangkayu mendukung sasaran RPJMD: **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, yang berada pada tujuan 2 RPJMD yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing**.

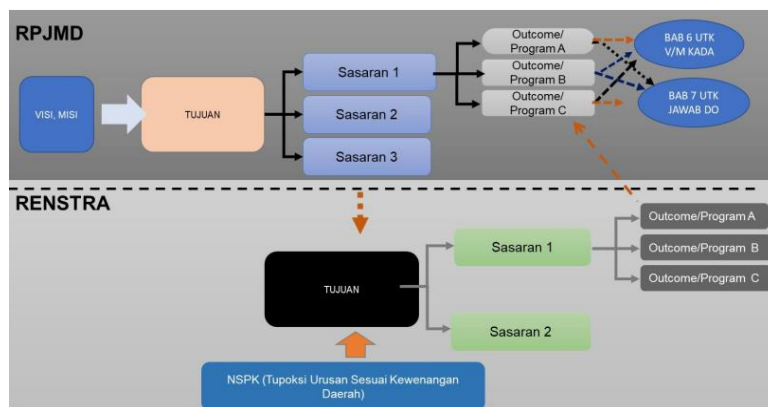
b. Sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun sasaran strategis Kecamatan

Marangkayu adalah ***”Meningkatnya kualitas layanan administrasi di Kecamatan”***.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
NSPK: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai	n/a	3,53	3,57	3,65	3,73	3,77	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Kecamatan berdasarkan: • Aspek Kebijakan Pelayanan, • Aspek Profesionalisme SDM, • Aspek Sarana Prasarana, • Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, • Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta • Aspek Inovasi.
Sasaran RPJMD: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang tertib		Meningkatnya Layanan Administrasi Di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	Cara Hitung: $\frac{\text{Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP}}{\text{Total Jumlah Pelayanan}} \times 100$

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	Persen	75	80	86	87	89	90	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des diaplikasi Siskuedes web (20%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa tepat waktu</u> Jumlah Desa di Kecamatan 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdes secara 100% (15%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa optimal aplikasi</u> Jumlah Desa di Kecamatan 3. Persentasi realisasi anggaran di atas 90% (20%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa realisasi anggaran >90%</u> Jumlah Desa di Kecamatan Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa menyampaikan ≤31 Maret</u> Jumlah Desa di Kecamatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: $\frac{\text{Jumlah Desa menyampaikan} \leq 31 \text{ April}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}}$ 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) Cara Hitung: $\frac{\text{Jumlah Desa Terisi Prosdekel \& SDGS}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}}$ 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara Hitung: $\frac{\text{Jumlah Desa Menyampaikan laporan}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}}$

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Marangkayu, 2025

3.2. Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang konferhensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Tabel 3.2. Strategi Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
[1]	[2]	[3]
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Marangkayu, 2025

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, regional, dan kabupaten, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Marangkayu sangat penting untuk menunjukkan di mana sub kegiatan akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Penetapan Zona Utara Kutai Kartanegara sebagai kawasan prioritas pengembangan pangan dan pariwisata karena memiliki karakteristik wilayah yang mendukung kedua sektor tersebut. Secara geografis, Zona Utara Kutai Kartanegara didominasi oleh bentang alam dataran tinggi dan berbukit dengan kualitas tanah yang subur dan ketersediaan air permukaan yang melimpah sehingga menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan pertanian pangan. Selain itu, wilayah ini menyimpan kekayaan biodiversitas, bentang alam yang eksotik, serta budaya lokal yang masih lestari sehingga menjadikannya sangat cocok untuk pengembangan pariwisata berbasis alam, ekowisata, dan wisata budaya.

Wilayah seperti Kecamatan Marangkayu menyuguhkan atraksi wisata alami yang unik, seperti wisata danau dengan konsep wisata alam terbuka. Keberadaan komunitas adat dan kearifan lokal juga menjadi daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki wilayah lain. Kombinasi antara kesuburan lahan, kekayaan potensi wisata, dan kekhasan budaya inilah yang menjadikan Kecamatan Marangkayu yang berada di Zona Utara memiliki keunggulan komparatif sebagai kawasan terpadu untuk pengembangan pangan dan pariwisata secara berkelanjutan.

Dalam perencanaan jangka menengah, zona utara fokus pada pertanian dan pengembangan pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

- Zona Kawasan Pusat Pangan Pembangunan Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian Baru serta Area Perikanan Strategis;
- Pengembangan Kawasan Pariwisata Baru.

Berdasarkan distribusi program prioritas per Kecamatan berdasarkan arah kebijakan kewilayahan, Kecamatan Marangkayu yang berada di zona utara menjadi prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berbasis perikanan air tawar serta pariwisata lokal. Kecamatan seperti Marangkayu, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, dan Tabang diarahkan untuk:

- Peningkatan produktivitas pertanian (padi dan ubi kayu).
- Penguatan sentra perikanan air tawar.
- Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam dan budaya.

Adapun targetnya terwujudnya lumbung pangan daerah yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan, serta tumbuhnya ekonomi wisata berbasis kearifan lokal.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antarwilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Marangkayu, 2025

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Marangkayu sebagai berikut:

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
6			Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Kelurahan
7			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
8			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
9			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
10			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Marangkayu, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kecamatan Marangkayu ditentukanlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Marangkayu adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum serta memberikan pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan local yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan maupun stakeholder melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat kecamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam rangka menjamin kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif melalui upaya koordinatif lintas sektor serta

pelibatan aktif aparat dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman.

- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh camat sebagai perpanjangan tangan bupati/wali kota dalam mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, mencakup pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta penanganan konflik sosial dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh camat selaku perangkat daerah kabupaten/kota untuk membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

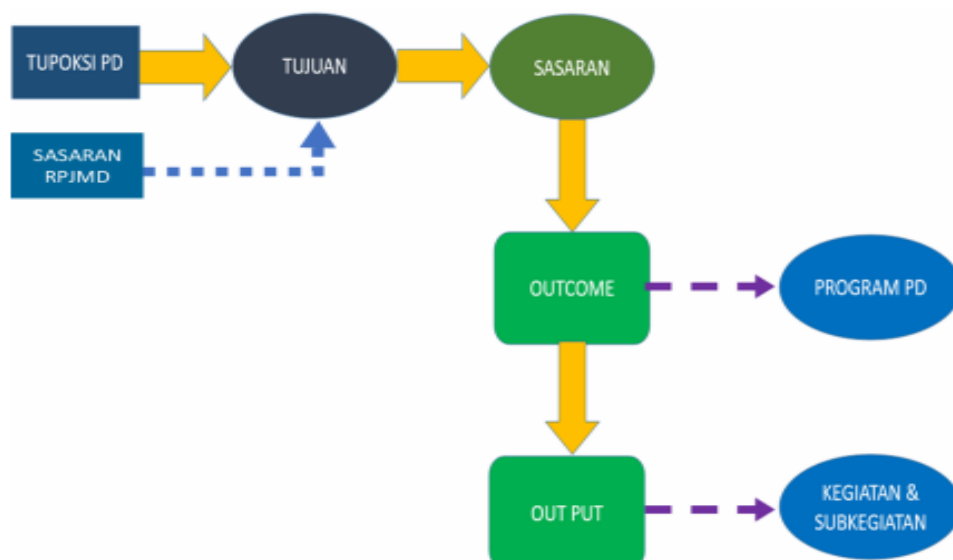
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Marangkayu adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Marangkayu merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Marangkayu serta tersebut dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Peningkatan layanan administrasi di Kecamatan	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
					Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik		
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja PD yang Efektif dan Efesien		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
							Program
							Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan
				Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Barang Milik Daerah SKPD			
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
				Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan
				Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Diadakan	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program	
				Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan			
					Terlaksannya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terlaksannnya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terlaksannnya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumla kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan
				Terlaksannnya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sub Kegiatan
				Terlaksannnya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
				Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program
					Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
					Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program
				Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi tugas Forkopimcam	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan desa		Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan

Sumber: Kecamatan Marangkayu, 2025

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Marangkayu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				13.729.808.302,00		37.519.958.619,72		38.980.521.013,34		42.159.275.770,09		44.681.710.752,45		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.472.314.302,00		9.912.314.302,72		9.572.314.302,34		9.127.314.302,09		9.127.314.302,45		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Marangkayu)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	74	75	5.472.314.302,00	76	9.912.314.302,72	77	9.572.314.302,34	78	9.127.314.302,09	79	9.127.314.302,45	7.01.1.03.0.00.14.0000 - Kecamatan Marangkayu	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				320.000.000,00		655.000.000,00		655.000.000,00		655.000.000,00		655.000.000,00		
Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	320.000.000,00	1	655.000.000,00	1	655.000.000,00	1	655.000.000,00	1	655.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	24				24				24			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0				1				1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	1	0				1				1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)													
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	200	200		200		200		200		200			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	40.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen RKA-SKPD	(Dokumen)													
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.00 0,00		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	24	24	30.000.00 0,00	24	150.000.000,0 0	24	150.000.000,0 0	24	150.000.000,00	24	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				250.000.0 00,00		350.000.000,0 0		350.000.000,0 0		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	200	200	250.000.0 00,00	200	350.000.000,0 0	200	350.000.000,0 0	200	350.000.000,00	200	350.000.000,00		
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.614.534.83 3,00		4.639.534.833, 72		4.639.534.833, 34		4.639.534.833, 09		4.639.534.833, 45		
Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12	12	4.614.534.83 3,00	12	4.639.534.833, 72	12	4.639.534.833, 34	12	4.639.534.833, 09	12	4.639.534.833, 45		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)													
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	45		45		45		45		45			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.439.534. 833,00		4.439.534.833, 72		4.439.534.833, 34		4.439.534.833, 09		4.439.534.833, 45		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	45	4.439.534. 833,00	45	4.439.534.833, 72	45	4.439.534.833, 34	45	4.439.534.833, 09	45	4.439.534.833, 45		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.00 0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	25.000.00 0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				150.000.0 00,00		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				128.600.000,00		318.600.000,00		318.600.000,00		318.600.000,00		318.600.000,00		
Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD (Laporan)	1	0	128.600.000,00	1	318.600.000,00	1	318.600.000,00	1	318.600.000,00	1	318.600.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.00 0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	25.000.00 0,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.00 0,00		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.00 0,00	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				53.600.00 0,00		63.600.000,00		63.600.000,00		63.600.000,00		63.600.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	53.600.00 0,00	4	63.600.000,00	4	63.600.000,00	4	63.600.000,00	4	63.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0,00	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0,00	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				362.500.0 00,00		600.000.000,0 0		600.000.000,0 0		605.000.000,00		605.000.000,00		
Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	362.500.0 00,00	1	600.000.000,0 0	1	600.000.000,0 0	1	605.000.000,00	1	605.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1							
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1							
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1					
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				130.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	130.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.00 0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	20.000.00 0,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.0 00,00		250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	130.000.0 00,00	12	250.000.000,0 0	12	250.000.000,0 0	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.00 0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.00 0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.00 0,00		1.200.000.000, 00		850.000.000,0 0		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	275	3	60.000.00 0,00	10	1.200.000.000, 00	10	850.000.000,0 0	10	400.000.000,00	10	400.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0				1		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	0				0		1		0			0
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7	0		10		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	0		1		0		0					
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		500.000.000,0 0		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7	0	0,00	10	500.000.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		450.000.000,0 0		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	0	0,00	0	0,00	1	450.000.000,0 0	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.00 0,00		200.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	275	3	60.000.00 0,00	10	200.000.000,0 0	10	200.000.000,0 0	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		200.000.000,0 0		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	1	200.000.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				0,00		200.000.000,0 0		200.000.000,0 0		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	0	0,00	1	200.000.000,0 0	1	200.000.000,0 0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,0 0		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	0	0,00	1	100.000.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				383.800.0 00,00		406.300.000,0 0		416.300.000,0 0		416.300.000,00		416.300.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	383.800.0 00,00	12	406.300.000,0 0	12	416.300.000,0 0	12	416.300.000,00	12	416.300.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12					
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000, 00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.500.000, 00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi,				381.300.0 00,00		381.300.000,0 0		381.300.000,0 0		381.300.000,00		381.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Sumber Daya Air dan Listrik																	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	381.300.000,00	12	381.300.000,00	12	381.300.000,00	12	381.300.000,00	12	381.300.000,00					
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00					
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0,00	12	20.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00					
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				602.879.469,00		1.942.879.469,00		1.942.879.469,00		1.942.879.469,00		1.942.879.469,00					
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	0	602.879.469,00	10	1.942.879.469,00	10	1.942.879.469,00	10	1.942.879.469,00	10	1.942.879.469,00					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	1				3				3				3		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	54	0				2				2				2		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				3				3				3		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3	3				3				4				4		4

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7		10		10		10					
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30		30		30		30					
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	51.250.000,00	10	51.250.000,00	10	51.250.000,00	10	51.250.000,00	10	51.250.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				171.629.469,00		171.629.469,00		171.629.469,00		171.629.469,00		171.629.469,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	171.629.469,00	3	171.629.469,00	4	171.629.469,00	4	171.629.469,00	4	171.629.469,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	0	0,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	150.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	1	200.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	54	0	0,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.326.494.000,00		8.101.644.317,00		9.902.206.711,00		13.525.961.468,00		16.048.396.450,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Marangkayu)	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)	81,66	81,80	5.826.494.000,00	82	7.401.644.317,00	84	9.202.206.711,00	86	12.825.961.468,00	90	15.348.396.450,00	7.01.1.03.0.00.14.000 - Kecamatan Marangkayu		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.826.494.000,00		7.401.644.317,00		9.202.206.711,00		12.825.961.468,00		15.348.396.450,00			
Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	5.826.494.000,00	1	7.401.644.317,00	1	9.202.206.711,00	1	12.825.961.468,00	1	15.348.396.450,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	15		2		2		2		2				
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				826.494.000,00		756.494.000,00		756.494.000,00		756.494.000,00		756.494.000,00			
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2	15	826.494.000,00	2	756.494.000,00	2	756.494.000,00	2	756.494.000,00	2	756.494.000,00			
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.000.000.000,00			6.645.150.317,00		8.445.712.711,00		12.069.467.468,00		14.591.902.450,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	5.000.000.000,00	1	6.645.150.317,00	1	8.445.712.711,00	1	12.069.467.468,00	1	14.591.902.450,00			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Marangkayu)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	100	100	500.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kec.				400.000.0 00,00		550.000.000,0 0		550.000.000,0 0		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	2	400.000.0 00,00	3	550.000.000,0 0	3	550.000.000,0 0	3	550.000.000,00	3	550.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				150.000.0 00,00		250.000.000,0 0		250.000.000,0 0		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	2	150.000.0 00,00	3	250.000.000,0 0	3	250.000.000,0 0	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				250.000.0 00,00		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	250.000.0 00,00	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.0 00,00		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	26	2	100.000.0 00,00	26	150.000.000,0 0	26	150.000.000,0 0	26	150.000.000,00	26	150.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.0 00,00		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	26	2	100.000.0 00,00	26	150.000.000,0 0	26	150.000.000,0 0	26	150.000.000,00	26	150.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.0 00,00		18.625.000.000, 00		18.625.000.000, 00		18.625.000.000,0 0		18.625.000.000, 00		
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Marangkayu)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (%)	80	81	436.000.0 00,00	100	18.625.000.000, 00	100	18.625.000.000 ,00	100	18.625.000.000,0 0	100	18.625.000.000, 00	7.01.1.03.0.00.14.0 000 - Kecamatan Marangkayu	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100.000.0 00,00		175.000.000,0 0		175.000.000,0 0		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	50	50	100.000.0 00,00	50	175.000.000,0 0	50	175.000.000,0 0	50	175.000.000,00	50	175.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50.000.00 0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	50	50	50.000.00 0,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				50.000.00 0,00		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	50.000.00 0,00	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				336.000.0 00,00		18.450.000.000, 00		18.450.000.000, 00		18.450.000.000, 00		18.450.000.000, 00		
Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	336.000.0 00,00	126	18.450.000.000, 00	126	18.450.000.000, 00	126	18.450.000.000,0 0	126	18.450.000.000,0 0		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				336.000.0 00,00		18.450.000.000, 00		18.450.000.000, 00		18.450.000.000,0 0		18.450.000.000,0 0		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	336.000.0 00,00	126	18.450.000.000, 00	126	18.450.000.000, 00	126	18.450.000.000,0 0	126	18.450.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Lembaga Kemasyarakatan)													
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.0 00,00		311.000.000,0 0		311.000.000,0 0		311.000.000,00		311.000.000,00		
Terpeliharanya ketentraman dan keteriban umum di masyarakat (Marangkayu)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	80	81	175.000.0 00,00	82	311.000.000,0 0	83	311.000.000,0 0	84	311.000.000,00	85	311.000.000,00	7.01.1.03.0.00.14.0 000 - Kecamatan Marangkayu	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				175.000.0 00,00		311.000.000,0 0		311.000.000,0 0		311.000.000,00		311.000.000,00		
Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	175.000.0 00,00	24	311.000.000,0 0	24	311.000.000,0 0	24	311.000.000,00	24	311.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3	4		3		3		3					
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.00 0,00		236.000.000,0 0		236.000.000,0 0		236.000.000,00		236.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	50.000.00 0,00	24	236.000.000,0 0	24	236.000.000,0 0	24	236.000.000,00	24	236.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masy.				125.000.0 00,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3	4	125.000.0 00,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.0 00,00		445.000.000,0 0		445.000.000,0 0		445.000.000,00		445.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Marangkayu)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	195.000.0 00,00	100	445.000.000,0 0	100	445.000.000,0 0	100	445.000.000,00	100	445.000.000,00	7.01.1.03.0.00.14.0 000 - Kecamatan Marangkayu	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				195.000.0 00,00		445.000.000,0 0		445.000.000,0 0		445.000.000,00		445.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	75	75	195.000.0 00,00	75	445.000.000,0 0	75	445.000.000,0 0	75	445.000.000,00	75	445.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180.000.0 00,00		430.000.000,0 0		430.000.000,0 0		430.000.000,00		430.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	75	75	180.000.000,00	75	430.000.000,00	75	430.000.000,00	75	430.000.000,00	75	430.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Marangkayu)	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (%)	85	85	125.000.000,00	86	125.000.000,00	87	125.000.000,00	88	125.000.000,00	89	125.000.000,00	7.01.1.03.0.00.14.000 - Kecamatan Marangkayu	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11	11	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	11	11		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KE T.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				50.000.00 0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11	11	50.000.00 0,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				75.000.00 0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	11	11	75.000.00 0,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00		

Sumber: SIPD-RI, 2025

4.2. Sub Kegiatan Prioritas

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dari teknik cascading (penurunan kinerja). Dan merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Program RT Ku-Terbaik	Penyaluran Program RT di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberadayaan Kelurahan	
2	Program Pelayanan Publik Cerdas	Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

Sumber: Kecamatan Marangkayu, 2025

4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan mandat kewenangan serta arah kebijakan pembangunan

daerah. IKU menjadi alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan mendukung realisasi tujuan jangka menengah dinas. Penetapan IKU memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta kontribusi langsung terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Dengan demikian, keberadaan IKU dalam dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marangkayu sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marangkayu

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
IKU Tujuan									
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai	3,53	3,57	3,65	3,73	3,77	3,81	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Kecamatan berdasarkan: Aspek Kebijakan Pelayanan, • Aspek Profesionalisme SDM, • Aspek Sarana Prasarana, • Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, • Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta • Aspek Inovasi.
IKU Sasaran									
1	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	Cara Hitung: Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi Total Jumlah Pelayanan dikali 100
2	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	Persen	80	86	87	89	90	93	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des diaplikasi Siskuedes web (20%) Cara Hitung: Jumlah Desa tepat waktu dibagi Jumlah Desa di Kecamatan 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdес secara 100% (15%) Cara Hitung: Jumlah Desa optimal aplikasi dibagi Jumlah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
									Desa di Kecamatan 3. Persentasi realisasi anggaran di atas 90% (20%) Cara Hitung: Jumlah Desa realisasi anggaran >90% dibagi Jumlah Desa di Kecamatan
Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa menyampaikan ≤31 Maret dibagi Jumlah Desa di Kecamatan 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa menyampaikan ≤31 April dibagi Jumlah Desa di Kecamatan 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa Terisi Prosdekel & SDGS dibagi Jumlah Desa di Kecamatan 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%). Cara Hitung: Jumlah Desa Menyampaikan laporan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan									

Sumber: Kecamatan Marangkayu, 2025

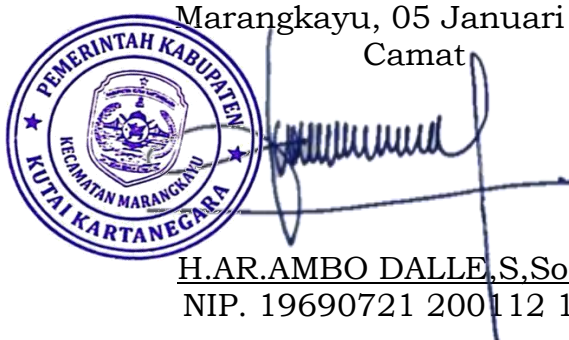
BAB V PENUTUP

Rencana strategis Kecamatan Marangkayu Tahun 2025–2029 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2029. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kecamatan Marangkayu Tahun 2025-2029 mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Marangkayu sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana strategis Perubahan ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Marangkayu.

Rancangan Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Marangkayu. Dengan demikian, setelah Rancangan Rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Marangkayu telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas di dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Marangkayu, 05 Januari 2026
Camat



H.AR.AMBO DALLE, S.Sos, MH
NIP. 19690721 200112 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KECAMATAN MARANGKAYU